



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA  
Jabatan : PJ. Walikota Padang Panjang

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG  
SONNY BUDAYA PUTRA

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
KOTA PADANG PANJANG  
Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si  
NIP. 196901201989021001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

| No | Sasaran Strategis                                                       | Indikator kinerja                                                                         |                                                                                           | Target  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                                         | Sebelum                                                                                   | Sesudah                                                                                   | Sebelum | Sesudah |
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                         | 5       | 6       |
| 1  | Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan                    | Persentase PPKS yang tertangani                                                           | Persentase PPKS yang tertangani                                                           | 92%     | 92%     |
| 2  | Meningkatkan pemenuhan hak anak                                         | Tingkat capaian Kota Layak Anak                                                           | Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar                                    | Nindya  | 83,5 %  |
| 3  | Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak                | Predikat APE                                                                              | Predikat APE                                                                              | Pratama | Madya   |
| 4  | Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana              | Rata-rata jumlah anak perkeluarga                                                         | Rata-rata jumlah anak perkeluarga                                                         | 2,51    | 2,35    |
| 5  | Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting | Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran | Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran | 55%     | 70%     |

| No | Program                                              | Anggaran (Rp.) |               |
|----|------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|    |                                                      | Sebelum        | Sesudah       |
| 1  | Penunjang urusan pemerintahan daerah                 | 6,373,666,446  | 6,678,529,022 |
| 2  | Pemberdayaan Sosial                                  | 1,472,802,050  | 1,379,250,500 |
| 3  | Rehabilitasi Sosial                                  | 967,816,800    | 857,810,000   |
| 4  | Perlindungan dan Jaminan Sosial                      | 323,111,100    | 488,331,100   |
| 5  | Penanganan Bencana                                   | 228,653,251    | 192,267,251   |
| 6  | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                     | 22,370,000     | 24,590,000    |
| 7  | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan    | 179,370,700    | 171,273,750   |
| 8  | Perlindungan Perempuan                               | 391,778,450    | 372,268,450   |
| 9  | Pemenuhan Hak Anak                                   | 166,762,900    | 166,762,900   |
| 10 | Perlindungan Khusus Anak                             | 541,303,800    | 464,030,400   |
| 11 | Pengendalian Penduduk                                | 172,849,700    | 96,782,450    |
| 12 | Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | 1,561,832,250  | 1,490,074,000 |
| 13 | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1,145,819,000  | 1,082,914,000 |

Padang Panjang, 1 November 2024

  
 PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG  
 SONNY BUDAYA PUTRA

  
 KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
 KOTA PADANG PANJANG  
 Dwi GEMAN B N NUR, M. Si  
 NIP. 19890120 198902 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YETI SYOFYARNI, SE, ME**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
  
**Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
NIP. 19690120 198902 1 001

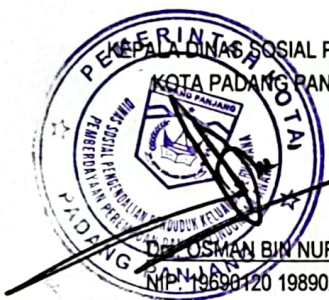
Pihak Pertama  
**SEKRETARIS DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
  
**YETI SYOFYARNI, SE, ME**  
NIP. 19740301 199403 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

| No | Sasaran Strategis                             | Indikator kinerja                            | Target  |         |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                               |                                              | Sebelum | Sesudah |
| 1  | 2                                             | 3                                            | 4       | 5       |
| 1  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Ketepatan dan keakuratan penyampaian laporan | 90%     | 90%     |

| No | Program/Kegiatan                                                      | Anggaran (Rp.) |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|    |                                                                       | Sebelum        | Sesudah       |
| 1  | Penunjang urusan pemerintahan daerah                                  | 6,373,666,446  | 6,506,755,922 |
| 1) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 5,134,859,166  | 5,392,740,472 |
| 2) | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 17,850,000     | 17,850,000    |
| 3) | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 225,383,200    | 311,126,900   |
| 4) | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 50,069,400     | 67,991,400    |
| 5) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 734,639,680    | 697,961,250   |
| 6) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 210,865,000    | 19,085,900    |

Padang Panjang, 1 Novemver 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
KOTA PADANG PANJANG  
  
DIPLOSMAN BIN NUR, M. Si  
NIP. 19690120 198902 1 001

SEKRETARIS DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
KOTA PADANG PANJANG

  
YETTI SYOFYARNI, SE, ME  
NIP. 19740301 199403 2 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ICIP HARIANTO, S.Th.I**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **YETTI SYOFYARNI, SE, ME**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
  
**YETTI SYOFYARNI, SE, ME**  
**NIP. 19740301 199403 2 001**

Pihak Pertama  
**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
  
**ICIP HARIANTO, S.Th.I**  
**NIP. 198106172010011025**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | Target           |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                        | Sebelum          | Sesudah         |
| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                      | 4                | 5               |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan                                                             | 37 orang / bulan | 560 orang/bulan |
| 2  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 | 37 Paket         | 40 Paket        |
| 3  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                     | 4 paket          | 4 paket         |
| 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 paket          | 4 paket         |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 12 paket         | 12 paket        |
| 6  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 24 laporan       | 24 laporan      |
| 7  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan                                                             | 20 unit          | 13 unit         |
| 8  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 11 unit          | 0 unit          |
| 9  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 laporan       | 36 laporan      |
| 10 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 laporan       | 12 laporan      |
| 11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 21 unit          | 21 unit         |
| 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 unit          | 27 unit         |
| 13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                             | 55 unit          | 55 unit         |
| 14 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 unit           | 6 unit          |

| NO | SUB KEGIATAN                                           | Anggaran (Rp.) |               |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|    |                                                        | Sebelum        | Sesudah       |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | 5,134,859,166  | 5,392,740,472 |
| 2  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 17,850,000     | 17,850,000    |

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                        | Anggaran (Rp.) |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|    |                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah     |
| 3  | Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 5,386,300      | 5,386,300   |
| 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 59,998,900     | 53,624,600  |
| 5  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 10,000,000     | 10,000,000  |
| 6  | penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 149,998,000    | 242,116,000 |
| 7  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 50,069,400     | 67,991,400  |
| 8  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 53,893,680     | 35,955,250  |
| 9  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 680,746,000    | 662,006,000 |
| 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 111,511,000    | 111,505,000 |
| 11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 35,504,000     | 35,504,000  |
| 12 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 23,850,000     | 23,850,000  |
| 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 40,000,000     | 20,000,000  |



Padang Panjang, 1 November 2024  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
ICIP HARIANTO. S.Th.I  
NIP. 198106172010011025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIMAN THAIB, SP, M. SI  
Jabatan : Kabid Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
KOTA PADANG PANJANG  
  
Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI  
NIP. 19690120 198902 1 001

Pihak Pertama  
KABID PELAYANAN PENANGANAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL  
  
SYAFRIMAN THAIB, SP, M. SI  
NIP. 19690921 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI SOSIAL**  
**DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                             | Indikator kinerja                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | Target  |         |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                      | Sebelum                                                                                                                                                    | Sesudah                                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah |
| 1  | Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan | Persentase PPKS Yang Tertangani                                                                                                                            | Persentase PPKS Yang Tertangani                                                                                                                            | 92%     | 92%     |
| 1) | Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 100%    | 100%    |
|    |                                                      | Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                            | Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                            | 92%     | 92%     |
| 2) | Meningkatnya pelayanan social bagi korban bencana    | Persentase korban bencana yang tertangani                                                                                                                  | Persentase korban bencana yang tertangani                                                                                                                  | 100%    | 100%    |

| No | Program/Kegiatan                                            | Anggaran (Rp.) |             |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|    |                                                             | Sebelum        | Sesudah     |
| 1  | Rehabilitasi Sosial                                         | 967,816,800    | 857,810,000 |
| 1) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, | 618,561,400    | 534,043,500 |
| 2) | Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan             | 349,255,400    | 323,766,500 |
| 2  | Penanganan Bencana                                          | 228,653,251    | 192,267,251 |
|    | Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial                 | 71,585,000     | 35,199,000  |
| 1) | Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                        | 157,068,251    | 157,068,251 |
| 3  | Perlindungan dan Jaminan Sosial                             | 226,685,100    | 408,681,100 |
| 1) | Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             | 226,685,100    | 408,681,100 |

Padang Panjang, 1 November 2024

  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**DR. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
**NIP. 19690120 198902 1 001**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN PENANGANAN DAN**  
**REHABILITASI SOSIAL**  
  
**SYAFRIMAN THAIB, SP, M. Si**  
**NIP. 19690921 199803 1 005**



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. HIRDA**

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
  
**Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
**NIP. 19690120 198902 1 001**

Pihak Pertama  
**KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN**  
**PENANGANAN FAKIR MISKIN**  
  
**Dra. HIRDA**  
**NIP. 19671017 199203 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN**  
**DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                                       | Indikator kinerja                                                                       |                                                                                         | Target  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                                                | Sebelum                                                                                 | Sesudah                                                                                 | Sebelum | Sesudah |
| 1  | Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan                           | Persentase PPKS Yang Tertanganl                                                         | Persentase PPKS Yang Tertanganl                                                         | 92%     | 92%     |
| 1) | Meningkatkan Pemberdayaan sosial dalam penanganan masalah sosial di masyarakat | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif | 100%    | 100%    |
| 2) | Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS                              | Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial           | Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial           | 87.0%   | 87.0%   |
| 3) | Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                  | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara                                         | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara                                         | 100%    | 100%    |

| No | Program/Kegiatan                                            | Anggaran (Rp.) |               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|    |                                                             | Sebelum        | Sesudah       |
| 1  | Pemberdayaan Sosial                                         | 1,472,802,050  | 1,379,250,500 |
| 1) | Daerah Kabupaten/Kota                                       | 1,472,802,050  | 1,379,250,500 |
| 2  | Perlindungan dan Jaminan Sosial                             | 96,426,000     | 79,650,000    |
| 1) | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 96,426,000     | 79,650,000    |
| 3  | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                            | 22,370,000     | 24,590,000    |
| 1) | Kabupaten/Kota                                              | 22,370,000     | 24,590,000    |

Padang Panjang, 1 November 2024

  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Drs. OSMAN BIN NUOR, M. Si**  
**NIP. 19690120 198902 1 001**

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN**  
**PENANGANAN FAKIR MISKIN**  
  
**Dra. HIRDA**  
**NIP. 19671017 199203 1 003**



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **UPIT HARNITA, SKN**  
Jabatan : **Plt.Kabid Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
  
**Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
**NIP. 19690120 198902 1 001**

Pihak Pertama  
**Plt. KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

  
**UPIT HARNITA, SKM**  
**NIP 19700525 199101 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                                | Indikator kinerja                                                                         |                                                                                           | Target  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                                         | Sebelum                                                                                   | Sesudah                                                                                   | Sebelum | Sesudah |
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                         |                                                                                           | 4       |         |
| 1  | Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga                        | Rata - rata anak perkeluarga                                                              | Rata - rata anak perkeluarga                                                              | 2.51%   | 2.35%   |
|    | 1) Meningkatkan Pengendalian Penduduk                                   | Persentase perangkat daerah memanfaatkan dokumen kependudukan sebagai bahan perencanaan   | Persentase perangkat daerah memanfaatkan dokumen kependudukan sebagai bahan perencanaan   | 100.0%  | 100.0%  |
|    | 2) Meningkatkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)                       | Persentase CPR                                                                            | Persentase CPR                                                                            | 62.0%   | 62.0%   |
| 2  | Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting | Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran | Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran | 55%     | 70%     |

| No | Program/Kegiatan                                            | Anggaran (Rp.) |               |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|    |                                                             | Sebelum        | Sesudah       |
| 1  | Pengendalian Penduduk                                       | 172,849,700    | 96,782,450    |
|    | 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah    | 35,799,750     | 17,767,050    |
|    | 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan         | 137,049,950    | 79,015,400    |
| 2  | Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                           | 1,561,832,250  | 1,490,074,000 |
|    | 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi  | 606,900,000    | 606,900,000   |
|    | 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan        | 279,350,000    | 260,320,000   |
|    | 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat | 429,104,000    | 429,104,000   |
|    | 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi      | 246,478,250    | 193,750,000   |
| 3  | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)        | 1,145,819,000  | 1,082,914,000 |
|    | 1) Ketahanan                                                | 291,305,000    | 334,030,000   |
|    | 2) Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam       | 854,514,000    | 748,884,000   |

Padang Panjang, 1 November 2024

  
**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
Dis. OSMAN BIN NUR, M. Si  
 NIP. 19690120 198902 1 001

**PIL.KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**KELUARGA BERENCANA**

  
UPIT HARNITA, SKM  
 NIP. 19700525 199101 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAIZIL WARDAH, S.SI.ME

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
KOTA PADANG PANJANG  
Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI  
NIP. 19690120 198902 1 001

Pihak Pertama  
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

FAIZIL WARDAH, S.SI. ME  
NIP. 197411112002122004

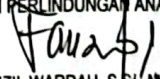
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

| No | Sasaran Program/Kegiatan                                                      | Indikator kinerja                                                                                                                 |                                                                                                                                | Target  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                                                               | Sebelum                                                                                                                           | Sesudah                                                                                                                        | Sebelum | Sesudah |
| 1  | 2                                                                             | 3                                                                                                                                 |                                                                                                                                | 4       |         |
| 1  | Meningkatkan pembangunan                                                      | Prodikot APE                                                                                                                      | Prodikot APE                                                                                                                   | Pratama | Madya   |
|    | 1) Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Organisasi perempuan aktif                                                                                             | Persentase Organisasi perempuan aktif                                                                                          | 100%    | 100%    |
|    |                                                                               |                                                                                                                                   | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD                                                                                 | -       | 20%     |
|    | 2) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan                               | Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu | Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu | 100 BJT | 100%    |
| 2  | Meningkatkan pemenuhan hak anak ( PHA)                                        | Tingkat capaian Kota Layak Anak                                                                                                   | Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar                                                                         | Nindya  | 83,5%   |
|    | 1) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak                                            | Persentase indikator KLA yang terpenuhi                                                                                           | Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar                                                                         | -       | 83,5%   |
|    | 2) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak                                      | Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu      | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu      | 100 BJT | 100.0%  |

| No | Program/Kegiatan                                                         | Anggaran (Rp.) |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|    |                                                                          | Sebelum        | Sesudah     |
| 1  | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                        | 179,370,700    | 171,273,750 |
|    | 1) Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                          | 54,151,100     | 54,151,100  |
|    | 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,                 | 14,991,200     | 6,894,250   |
|    | 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia                           | 110,228,400    | 110,228,400 |
| 2  | Perlindungan Perempuan                                                   | 391,778,450    | 372,268,450 |
|    | 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 85,800,000     | 85,000,000  |
|    | 2) Korban kekerasan yang memerlukan koordinasi                           | 149,678,450    | 149,678,450 |
|    | 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia                           | 156,300,000    | 137,590,000 |
| 3  | Pemenuhan Hak Anak                                                       | 166,762,900    | 166,762,900 |
|    | 1) Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan                             | 64,006,300     | 64,006,300  |
|    | 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia                           | 102,756,600    | 102,756,600 |
| 4  | Perlindungan Khusus Anak                                                 | 541,303,800    | 464,030,400 |
|    | 1) para Pihak                                                            | 135,612,100    | 135,612,100 |
|    | 2) perlindungan Khusus yang Memrlukan Koordinasi Tingkat                 | 355,691,700    | 274,708,300 |
|    | 3) - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia                         | 50,000,000     | 53,710,000  |

Padang Panjang, 1 November 2024

  
 KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA  
 KOTA PADANG PANJANG  
 Drs. OSMAN BILAL NUR, M. Si  
 NIP. 19690120-198902 1 001

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK  
  
 FAIZIL WARDAH, S. Si ME  
 NIP. 197411112002122004